

ABSTRACT

This research aims to discover and analyze the implementation of e-government policy on a website management of Muaro Jambi government. The theory used in this research are policy implementation theory, e-government theory, and information transparency theory. The research methodology used is descriptive qualitative method. Techniques of collecting the data used by the researcher are data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result of this study showed that in a process of website management, there are some aspects that have not managed maximally, those aspects are Content Development, Competency Building, and Citizens Interfaces. In the process of managing the content development, according to the website maintenance guide, government's website must have at least 8 contents. In the official website of Muaro Jambi regency, there are 2 contents which are not maximally organized, those are aspiration services and complaint, and social media official accounts of the government. The management of competency building which mentioned is human resources who are expert in their fields. Department of communications and informatics of Muaro Jambi is one of the nine regional organizations which has human resources who are experts in technology and information. It consist of 6 persons, spesifically divided into 3 civil servants, and the other 3 are contract employees. Citizen interfaces is a kind of communications between government and citizen. There are several multi-accses channels ranging from fanspage, facebook, instagram and youtube. However, the link address of those social media is not displayed on the local government official website. In the implementation of information transparency, in a public information which provided is still not complete, and there is no special menu on website related with transparency of regional budgeting management which is displayed.

Key Words: *E-government, Information Transparency, Website*

INTI SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan *e-government* pada pengelolaan website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan teori *E-government* dan teori transparansi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengolah data yang digunakan penulis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan website terdapat beberapa aspek yang belum dikelola dengan maksimal yaitu pada bagian *Content Development*, *Competency Building* dan *Citizen Interfaces*. Dalam pengelolaan *content development*, menurut panduan penyelenggaraan website badan pemerintahan, situs website badan pemerintahan harus memiliki sekurang-kurangnya 8 konten. Pada website resmi Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2 konten yang belum dikelola secara maksimal yaitu pada layanan aspirasi dan pengaduan serta akun resmi media sosial badan pemerintahan. Pengelolaan *competency building* yang dimaksud adalah sumberdaya manusia yang ahli pada bidangnya. Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Muaro Jambi merupakan 1 dari 9 organisasi perangkat daerah yang memiliki sumberdaya manusia dibidang teknologi dan informasi yang terdiri dari 6 orang dengan status 3 orang aparatur sipil negara dan 3 orang tenaga kontrak. *Citizen interfaces*, merupakan bentuk dari komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sudah terdapat *multi-access channel* mulai dari *fanspage*, *facebook*, *instagram*, dan *youtube*. Akan tetapi alamat link dari media sosial tersebut tidak ditampilkan pada website resmi pemerintah daerah. Pada penerapan transparansi informasi pada bagian dokumen publik informasi yang disediakan belum cukup lengkap dan tidak ada menu khusus pada website mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah yang ditampilkan.

Kata Kunci : *E-government*, Transparansi Informasi, Website